BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintah yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandungkan, dan dapat dipahami.

Fenomona yang penulis temukan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yaitu adanya pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, yang menilai kualitas laporan keuangan daerah semakin memburuk. Indikasinya makin banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian dan tidak wajar. BPK (2005).

Fenomena yang penulis temukan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yaitu Pemerintah kota bandung membutuhkan sumber daya manusia yang profesional guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel. Edi Siswadi (2010).

Fenomena yang penulis temukan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Pemerintah menemukan kasus ketidakpastian dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Harry Azhar Azis (2015).

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah, Bastian (2010:336).

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut (Ardeno Kurniawan, 2013). Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Ardeno Kurniawan (2013).

Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ardeno Kurniawan (2013).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Nurlan Darise (2008:2).

Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Ulum (2008).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bastian (2010:9).

Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Bastian (2010:9).

Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Erlina Rasdianto (2013:23).

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Sri Astuti (2013).

Karaktersitik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.Erlina Rasdianto (2013:8).

Keempat karaktersitik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami. Erlina Rasdianto (2013:8).

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Erlina Rasdianto (2013:21).

Secara khusus tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya. Erlina Rasdianto (2013:21).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Ifa Ratifah (2012:30). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ifa Ratifah (2012:30).

Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Liza rahayu (2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Bastian (2006:87). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Bastian (2006:87). Opini Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bastian (2006:87). Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) yaitu penyimpangan yang material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bastian (2006:87).

Tabel. 1.1 Opini pemeriksaan laporan keuangan

Sumber: IHPS I Tahun 2016 BPK RI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Liza rahayu dkk, 2014). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Liza rahayu (2014). Hasil pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 mengungkapkan 251 opini WTP, 230 opini WDP, 4 opini TW, dan 19 opini TMP. Harry Azhar Azis (2015).

Tabel 1.2 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: IHPS I Tahun 2016 BPK RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Harry Azhar Azis (2015).

Kompetensi

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan infornasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibanding pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Tuasikal (2007).

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai. Indra Kesuma (2014).

Menurut H. Hadiri Nawawi (1992) menjelaskan tiga pengertian dari sumber daya manusia yakni :

1. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

3. Sumber Daya Manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material / non finansial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut sekretaris daerah kota bandung Edi Siswadi mengatakan, pemerintah kota bandung membutuhkan sumber daya manusia yang profesional guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel. Untuk memperbaiki kinerja di pemkot, seluruh SDM harus menguasai hal-hal teknis, memiliki pemahaman akan aturan yang berlaku serta cerdas secara intelektual, spiritual, emosional maupun sosial. Edi Siswadi (2010).

Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Anwar Nasution (2009). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Mardiasmo (2004:35).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum. Bastian (2010:137).

Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Mahmudi (2011:271). Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Deddi Nordiawan (2009:25).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Deddi Nordiawan (2009:25).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Bastian (2010:138). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Bastian (2010:138). Tujuan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Bastian (2010:138).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes

Suhardjo (2013). Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo dan Yohanes Suhardjo (2013).

Masalah di dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan penerapan akuntansi basis akrual. Harry Azhar Azis (2015). Berdasarkan pemeriksaan atas 207 LKPD, BPK menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Harry Azhar Azis (2015). Sedangkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Harry Azhar Azis (2015). Pada umumnya, Pemerintah Daerah belum menyiapkan peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya rencana pengembangan sistem/aplikasinya serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai di setiap satuan . Harry Azhar Azis (2015). Setiap daerah, harus siap menerapkan SAP berbasis . Harry Azhar Azis (2015). Jika tidak, opini BPK terhadap LKPD bisa turun. Harry Azhar Azis (2015).

Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, Tahria Syarfrudin menilai, minimnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Asisten VI Bidang Administrasi Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar

belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (http://pikiran-rakat.com/node/171153).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013), mengenai Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Rukmi Juwita (2013). Hasil penelitian ini adalah bahwa laporan keuangan relevan karena penggunaan basis akuntansi yang sangat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi. Rukmi Juwita (2013). Hal ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Rukmi Juwita (2013).

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013), mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Hasil penelitian ini adalah Dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Tual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota Tual. Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013).

Berdasarkan uraian di atas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dilatar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1) Minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor.
2) Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3) Opini TMP (tidak memberikan pendapat) atau *Disclaimer* untuk 18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Bandung.

2) Seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hasil studi empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut Sugiyono (2013:305), merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat. Memenuhi prinsip dasar dalam penelitian yaitu

adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kegunaan praktis atau akademik maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya.

1.5.2 Kegunaan Akademik

Menurut Uma Sekaran (2006:10), kegunaan akademis adalah untuk kepentingan pengembang keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna menerapkan kembali hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Dari pengertian di atas, penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari pengertian di atas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kualitas laporan keuangan yang belum baik. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah

pada kualitas laporan keuangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.